

Abstrak

Pembangunan Pasar Induk Keputran Baru menuai reaksi dari berbagai pihak. Reaksi keras menentang terwujudnya pasar ini berasal dari warga Kebraon, yang menganggap bahwa pasar induk ini tidak memenuhi segala persyaratan untuk dibangun. Lokasi pasar induk yang akan dibangun ini terletak dilokasi pemukiman yang padat. Sebaliknya, warga Kemlaten menunjukkan sikap yang mendukung terwujudnya pasar induk ini karena akan menyerap tenaga kerja dari warga sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan tentang, *pertama*, bagaimana latar belakang konflik warga Kebraon atas pembangunan Pasar Induk Keputran Baru. *Kedua*, bagaimana bentuk-bentuk konflik yang terjadi. *Ketiga*, berkaitan dengan penyelesaian konflik.

Tipe penelitian yang dipilih adalah deskriptif, dimana peneliti menyajikan gambaran secara mendalam tentang konflik yang terjadi di Kebraon. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam, serta data primer dan sekunder yang berhasil dikumpulkan lalu dianalisis secara kualitatif dengan mengacu pada teori-teori yang berperspektif konflik. Informan dipilih secara purposive dengan pertimbangan bahwa mereka benar-benar mengetahui dan paham mengenai konflik yang terjadi di Kebraon.

Berdasarkan temuan data dan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan; *pertama*, konflik ini dilatar belakangi oleh keputusan Pemkot yang tanpa perhitungan yang matang akan membangun Pasar Induk Keputran Baru di Kebraon. Warga menentang keras proyek ini karena pasar induk ini dibangun dikawasan yang padat penduduk. Terlebih Pemkot cenderung memihak pada investor dan mengabaikan aspirasi warga. *Kedua*, bentuk-bentuk konflik yang terjadi di Kebraon adalah bentuk konflik yang realistis. Warga melakukan berbagai upaya agar pasar induk ini tidak terwujud diantaranya dengan melakukan aksi demonstrasi, melakukan sabotase mencabuti spanduk-spanduk proyek hingga melakukan penutupan jalan Kebraon gang lima dengan portal. *Ketiga*, resolusi konflik yang dilakukan warga Kebraon adalah dengan melakukan mediasi dengan pihak anggota DPRD kota Surabaya. Langkah ini terbukti cukup efektif karena aspirasi warga lebih didengar dan DPRD berhasil menekan Pemkot agar menghentikan sementara proyek hingga permasalahan dengan warga terselesaikan.